



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TANPA MEKANISME
JUDICIAL: STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri



Oleh:

TOBAK

NIM:301221010061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI TEMBILAHAN
2026**



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : TOBAK
Nim : 301221010061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial:
Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Saya Yang Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Tidak Dibuat Oleh Orang Lain, Juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk Itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil Karya Orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar sarjana saya,

Demikian Surat pernyataan ini DiBuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Tembilahan, 2026

Yang menyatakan


TOBAK



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-Indragirihilir-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TOBAK
Nim : 301221010061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tembilahan Mei, 2026

Pembimbing I

Jamri, S.H., M.H

Pembimbing II

Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI

Bambang Sasmita Adi Putra SH., MH



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 3 6330 1314 (08) 21386 🌐 website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Penetapan Jadwal dan Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama	: Tobak
NIM	: 301221010061
Judul Skripsi	: Pemberhentian Kepala Desa Tanpa Mekanisme Judisial Studi Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Waktu	: Kamis, 23 Juli 2026
Tempat	: Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	: Lulus dengan Nilai B
Keterangan	: Aman dan Tertib

Tembilahan, 23 Juli 2026

Tim Penguji

1. Jamri, SH., MH
2. Vivi Arfiani Siregar, SH., MH
3. Syariffuddin, SH., MH
4. Dr. Siti Rahmah, SH., MH
5. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ilmu Karya Abdi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta tidak lupa shalawat dan salam Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H. selaku Dekan dan Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan segenap jajarannya.
3. Bapak Jamri, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

atas bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.

Tembilahan, 2026

Penulis

Tobak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TANPA MEKANISME JUDICIAL: STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh; Tobak

Pembimbing I: Jamri, SH., MH, Pembimbing II: Vivi Arfiani S, SH., M.H

ABSTRAK

Pemberhentian kepala desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan, perlindungan hak jabatan, serta prinsip demokrasi di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati/wali kota. Namun, mekanisme tersebut dinilai menimbulkan persoalan yuridis karena pemberhentian dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme judicial atau putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, konflik politik lokal, serta ketidakpastian hukum terhadap kedudukan kepala desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa atas usulan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, serta merumuskan konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Desa masih memberikan ruang dominasi kewenangan administratif tanpa adanya pengujian melalui lembaga peradilan. Hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas perlindungan terhadap hak-hak pejabat pemerintahan. Selain itu, tidak adanya mekanisme judicial menyebabkan kepala desa berada dalam posisi yang rentan terhadap kepentingan politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal berupa mekanisme pemberhentian kepala desa yang melibatkan proses pengujian atau kontrol judicial, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun mekanisme quasi peradilan administratif, sehingga tercipta keseimbangan antara pengawasan pemerintahan desa dan perlindungan hak hukum kepala desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTARISI

SURATPERNYATAAN	i
TANDAPERSETUJUANUJIAN.....	ii
BERITAACARABIMBINGANSKRIPSI.....	iii
BERITAACARAMEJAHIJAU	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTARISI	viii
DAFTARSINGKATAN.....	x
BABI PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	7
C. Tujuanpenelitian	8
D. ManfaatPenelitian.....	8
E. KerangkaTeori.....	10
F. KerangkaKonseptual	29
G. MetodePenelitian.....	30
BABIITINJAUANUMUM	
A. PengertiandanKedudukanDesadalamSistem Pemerintahan	34
B. KewenanganDesadanKepalaDesa.....	38
C. BadanPermusyawaratanDesadan Kewenangannya.....	42



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum mengenai Pemberhentian Kepala Desa atas Usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	51
B. Pemberhentian Kepala Desa dan penerapannya melalui Mekanisme Judicial sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi	76
C. Konsep Ideal Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa yang Menjamin Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Sistem Pemerintahan Desa	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

Daftar Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-Undang

RI:RepublikIndonesia

UUD:Undang-UndangDasar PP:

Peraturan Pemerintah

Permendagri;PeraturanMenteriDalamNegeri Pilkadaes:

Pemilihan Kepala Desa

Kades:KepalaDesa

BPD:BadanPermusyawaratanDesa

SH : Sarjana Hukum

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

